

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Presiden Republik Menindaklanjuti arahan Indonesia menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Sibolga;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, Kabupaten Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Utara, Bharat, Kabupaten **Padang** Lawas Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Kabupaten Karo, Deli Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh,

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kabupaten Lahat, Musi Rawas, Kabupaten Kabupaten Banyuasin, Ogan Kabupaten Ogan Ilir, Komering Ulu Timur, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko Muko; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Tengah;
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lingga; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Lombok Utara; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima,

- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Manggarai Timur; dan
 - 2) Level Kabupaten (tiga) yaitu Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Tengah Utara, Kabupaten Timor Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang,
- Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Kavong Utara, Kabupaten Rava, Pontianak, dan Kota Singkawang,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang,

- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Malinau: dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
 - 2) Level yaitu Kabupaten 3 (tiga) Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu,
- Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota s. untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Donggala, Kabupaten Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wajo: dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru. Kabupaten Kabupaten Soppeng, Sidenreng Rappang, Pinrang, Kabupaten Kabupaten Enrekang, Kabupaten Kabupaten Luwu, Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau,

- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria yaitu:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria yaitu Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara. Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Jaya, Kabupaten Lanny Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kota Jayapura,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

KEDUA

: Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada KESATU berpedoman Diktum pada Indikator Penvesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor 443-5847 HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti Pelayanan kesehatantermasuk didalamnya Pos Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima,lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk:
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/takeaway dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;

- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat:
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) padasaat *Work From Home* (WFH) tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk di dalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan

KEEMPAT

- kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan pokok masyarakat kebutuhan (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% pengaturan (seratus persen) dengan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasipada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,

- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;

- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan (konvensional dan masal, taksi online) sewa/rental) diberlakukan kendaraan dengan kapasitas maksimal 100% pengaturan (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face* shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak terbatas jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun Panduan Penyelenggaraan tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/ Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:

KELIMA

- 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
- 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
- 4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta tertentu, tempat objek yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan pokok masyarakat (pasar, kebutuhan swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada perbelanjaan/mall pusat tetap 100% (seratus persen) beroperasi dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;

- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat secara serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus

- persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial menimbulkan keramaian dapat kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus menggunakan persen) dengan aplikasi PeduliLindungi penerapan atau protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- pelaksanaan kegiatan rapat, seminar pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum dapat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% **(seratus** persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah:
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEENAM

- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
 - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara; dan
 - g. Kompetisi *Developmental Basketball League* (DBL) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara.
- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

KETUJUH

- b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Provinsi Jawa Timur, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
- c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEBELAS

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain.

- mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
- 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai herikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
 - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagaiberikut:

	Jumlah tes (per 1000
Mingguan	penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh	32
		Tenggara	

	T	T 4	
3.		Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	31
5.		Kabupaten Aceh Barat	154
6.		Kabupaten Aceh Besar	312
7.		Kabupaten Pidie	327
8.		Kabupaten Aceh Utara	455
9.		Kabupaten Simeulue	70
10.		Kabupaten Aceh Singkil	91
11.		Kabupaten Bireuen	346
12.		Kabupaten Aceh Barat	111
14.		Daya	111
13.			137
		Kabupaten Gayo Lues	
14.		Kabupaten Aceh Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan Raya	122
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	435
17.		Kabupaten Bener Meriah	22
18.		Kabupaten Pidie Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	200
20.		Kota Sabang	25
21.		Kota Lhokseumawe	152
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	119
	O /		
24.	Sumatera	Kabupaten Tapanuli	288
	Utara	Tengah	
25.		Kabupaten Tapanuli	440
		Utara	
26.		Kabupaten Tapanuli	204
		Selatan	
27.		Kabupaten Nias	21
28.		Kabupaten Langkat	757
29.		Kabupaten Karo	315
30.		Kabupaten Deli Serdang	3,381
31.			
		Kabupaten Simalungun	1,254
32.		Kabupaten Asahan	534
33.		Kabupaten Labuhanbatu	376
34.		Kabupaten Dairi	613
35.		Kabupaten Toba Samosir	265
36.		Kabupaten Mandailing	66
		Natal	
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak	38
		Bharat	
39.		Kabupaten Humbang	140
55.		Hasundutan	1 10
40.		Kabupaten Samosir	273
41.		Kabupaten Serdang	881
40		Bedagai	610
42.		Kabupaten Batu Bara	613
43.		Kabupaten Padang Lawas	209
_		Utara	
44.		Kabupaten Padang Lawas	218
45.		Kabupaten Labuhanbatu	261
		Selatan	
46.		Kabupaten Labuhanbatu	267
		Utara	
47.		Kabupaten Nias Utara	20
48.		Kabupaten Nias Barat	59
49.		Kota Medan	3,330
50.		Kota Pematangsiantar	373
51.		Kota Sibolga	13
52.		Kota Tanjung Balai	130
53.		Kota Binjai	205
54.		Kota Tebing Tinggi	244
55.		Kota Padang Sidempuan	334
56.		Kota Gunungsitoli	21
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	340
	I D	Selatan	
	Barat	Scialaii	

58. Kabupaten Solok 273 59. Kabupaten Sijunjung 360 60. Kabupaten Tanah Datar 500 61. Kabupaten Padang 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh 282 Kota Kabupaten Pasaman 208 64. Kabupaten Pasaman 141 Mentawai Kabupaten Pasaman 141 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Pasaman 341 Barat Kota Padang 1,425 70. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Solok 108 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Padang Panjang 81 Kota Padang Panjang 81 80 75. Kota Padang Panjang 81 Kota Padang Panjang 81 84 Kota Padan
60. Kabupaten Tanah Datar 500 61. Kabupaten Padang 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh 282 Kota Kabupaten Pasaman 208 65. Kabupaten Pasaman 141 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Dharmasraya 195 68. Kabupaten Pasaman 341 69. Kabupaten Pasaman 341 Barat Kota Padang 1,425 70. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 Kota Padang Panjang 81 81 Kota Pavakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Bengkalis 408 79.
61. Kabupaten Padang Pariaman 303 62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh 282 Kota Kabupaten Pasaman 208 64. Kabupaten Pasaman 141 65. Kabupaten Kepulauan Mentawai 195 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Pasaman 341 68. Kabupaten Pasaman 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Solok 108 72. Kota Padang Panjang 81 Kota Padang Panjang 81 81 Kota Payakumbuh 102 102 75. Kota Payakumbuh 102 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 Kabupaten Bengkalis 408 Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82.
Pariaman Sabupaten Agam 360
62. Kabupaten Agam 360 63. Kabupaten Lima Puluh 282 Kota Kabupaten Pasaman 208 65. Kabupaten Kepulauan 141 Mentawai Kabupaten Dharmasraya 195 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Pasaman 341 68. Kabupaten Pasaman 341 Barat Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Payakumbuh 102 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Indragiri Hulu 320 79. Kabupaten Bengkalis 408 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hulu 534 Kabupaten Kepulauan 271 Meranti
63. Kabupaten Lima Puluh Kota 282 64. Kabupaten Pasaman 208 65. Kabupaten Kepulauan Mentawai 141 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Polok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman Barat 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Payakumbuh 102 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Bengkalis 408 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hulu 534 83. Kabupaten Kepulauan 231 84. Kabupaten Kepulauan 364 85. Kota Pekanbaru 1,685 86. Kota Pekanbaru 1,685 <
64. Kota 65. Kabupaten Pasaman 208 65. Kabupaten Kepulauan Mentawai 141 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Solok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman Barat 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Padang Panjang 81 75. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Kenantan 231 Sin
64. Kota 65. Kabupaten Pasaman 208 65. Kabupaten Kepulauan Mentawai 141 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Solok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman Barat 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Padang Panjang 81 75. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Kenantan 231 Sin
65. Kabupaten Kepulauan 141 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Solok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Bukittinggi 198 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Indragiri Hulu 320 79. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Kannatan 231 83. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. </td
65. Kabupaten Kepulauan 141 66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Solok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Bukittinggi 198 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Indragiri Hulu 320 79. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Kannatan 231 83. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. </td
66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Solok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Bukittinggi 198 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Rokan Hulu 534 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Kuantan 231 83. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Merangin
66. Kabupaten Dharmasraya 195 67. Kabupaten Solok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Rokan Hulu 534 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Kenan Hulu 534 84. Kabupaten Kenan Hulu 529 Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448
67. Kabupaten Solok Selatan 130 68. Kabupaten Pasaman 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Padang Panjang 81 75. Kota Padang Panjang 81 76. Kota Padang Panjang 81 86. Kabupaten Kampar 66 Kota Payakumbuh 102 Kota Payakumbuh 102 Kota Payakumbuh 102 Kabupaten Kampar 640 Kabupaten Indragiri Hulu 320 Kabupaten Pelalawan 385 Kabupaten Rokan Hulu 534 Kabupaten Rokan Hilir 529 Kabupaten Kepulauan 231 Singingi 231 Kota Pekanbaru
68. Kabupaten Pasaman 341 69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Padang Panjang 81 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Payakumbuh 102 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Indragiri Hulu 320 Kabupaten Bengkalis 408 Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hulu 534 83. Kabupaten Kuantan 231 Singingi 231 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 Kabupaten Merangin 281 </td
Barat Kota Padang 1,425
69. Kota Padang 1,425 70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Bukittinggi 198 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 Kabupaten Merangin 281
70. Kota Solok 108 71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Bukittinggi 198 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 Kabupaten Merangin 281
71. Kota Sawahlunto 92 72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Bukittinggi 198 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Kampar 640 78. Kabupaten Indragiri Hulu 320 Kabupaten Bengkalis 408 Kabupaten Indragiri Hilir 517 Kabupaten Pelalawan 385 Kabupaten Rokan Hulu 534 Kabupaten Rokan Hilir 529 Kabupaten Kuantan 231 Singingi 231 Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 Kabupaten Merangin 281
72. Kota Padang Panjang 81 73. Kota Bukittinggi 198 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Kuantan 231 Singingi 231 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
73. Kota Bukittinggi 198 74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
74. Kota Payakumbuh 102 75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 86. Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 85. Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
75. Kota Pariaman 66 76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 85. Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
76. Riau Kabupaten Kampar 640 77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
77. Kabupaten Indragiri Hulu 320 78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
78. Kabupaten Bengkalis 408 79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
79. Kabupaten Indragiri Hilir 517 80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
80. Kabupaten Pelalawan 385 81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
81. Kabupaten Rokan Hulu 534 82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
82. Kabupaten Rokan Hilir 529 83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 Singingi Singingi 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
83. Kabupaten Siak 364 84. Kabupaten Kuantan 231 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
84. Kabupaten Kuantan 231 85. Kabupaten Kepulauan 271 Meranti Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
85. Kabupaten Kepulauan Meranti 271 86. Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
85.Kabupaten Kepulauan Meranti27186.Kota Pekanbaru1,68587.Kota Dumai44888.JambiKabupaten Kerinci3489.Kabupaten Merangin281
86. Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
86. Kota Pekanbaru 1,685 87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
87. Kota Dumai 448 88. Jambi Kabupaten Kerinci 34 89. Kabupaten Merangin 281
87.Kota Dumai44888.JambiKabupaten Kerinci3489.Kabupaten Merangin281
88.JambiKabupaten Kerinci3489.Kabupaten Merangin281
89. Kabupaten Merangin 281
1 0
91. Kabupaten Batanghari 585
1 8
92. Kabupaten Muaro Jambi 662
93. Kabupaten Tanjung 730
Jabung Barat
94. Kabupaten Tanjung 153
Jabung Timur
95. Kabupaten Bungo 552
96. Kabupaten Tebo 258
97. Kota Jambi 865
98. Kota Sungai Penuh 63
99. Sumatera Kabupaten Ogan 55
Selatan Komering Ulu
100. Kabupaten Ogan 123
Komering Ilir
101. Kabupaten Muara Enim 948
102. Kabupaten Muara Emin 948 Kabupaten Lahat 300
103. Kabupaten Musi Rawas 599
11.11 K O D 1 1 1 O T O
104. Kabupaten Musi 482
Banyuasin
Banyuasin 105. Kabupaten Banyuasin 635
Banyuasin 105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan 993
Banyuasin 105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan 993 Komering Ulu Timur
Banyuasin 105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan 993 Komering Ulu Timur 107. Kabupaten Ogan 269
Banyuasin 105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan 993 Komering Ulu Timur
Banyuasin 105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan 993 Komering Ulu Timur 107. Kabupaten Ogan 269
Banyuasin 105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan 993 Komering Ulu Timur 107. Kabupaten Ogan 269 Komering Ulu Selatan
Banyuasin 105. Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 108. Kabupaten Ogan Ilir 109. Kabupaten Empat 370
Banyuasin Kabupaten Banyuasin 635 106. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 107. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Ilir 108. Kabupaten Ogan Ilir

		I am at an a Him	
111		Lematang Ilir	407
111.		Kabupaten Musi Rawas	427
110		Utara	2.40
112.		Kota Palembang	2,485
113.		Kota Pagar Alam	204
114.		Kota Lubuklinggau	173
115.		Kota Prabumulih	141
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	128
		Selatan	
117.		Kabupaten Rejang	395
		Lebong	
118.		Kabupaten Bengkulu	443
		Utara	
119.		Kabupaten Kaur	89
120.		Kabupaten Seluma	286
121.		Kabupaten Muko Muko	136
122.		Kabupaten Lebong	253
123.		Kabupaten Kepahiang	102
124.		Kabupaten Bengkulu	166
		Tengah	
125.		Kota Bengkulu	541
126.	Lampung	Kabupaten Lampung	742
		Selatan	
127.		Kabupaten Lampung	936
		Tengah	
128.		Kabupaten Lampung	890
		Utara	
129.		Kabupaten Lampung	663
		Barat	
130.		Kabupaten Tulang	598
		Bawang	
131.		Kabupaten Tanggamus	879
132.		Kabupaten Lampung	763
		Timur	
133.		Kabupaten Way Kanan	660
134.		Kabupaten Pesawaran	653
135.		Kabupaten Pringsewu	585
136.		Kabupaten Mesuji	435
137.		Kabupaten Tulang	1,000
107.		Bawang Barat	1,000
138.		Kabupaten Pesisir Barat	226
139.		Kota Bandar Lampung	791
140.		Kota Metro	124
141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	244
142.	Bangka	Kabupaten Belitung	137
	Belitung		455
143.	Demang	Kabupaten Bangka Selatan	455
144.		Kabupaten Bangka	284
144.		_	404
1/5		Tengah Vahunatan Bangka Barat	208
145.		Kabupaten Bangka Barat	308
146.		Kabupaten Belitung	94
1 4 7		Timur	200
147.	TZ 1	Kota Pangkalpinang	308
148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	237
149.	Riau	Kabupaten Karimun	171
150.		Kabupaten Natuna	58
151.		Kabupaten Lingga	65
152.		Kabupaten Kepulauan	94
150		Anambas	1 1 4 0
153.		Kota Batam	1,148
154.	77	Kota Tanjung Pinang	315
155.	Nusa	Kabupaten Lombok Barat	530
156.	Tenggara	Kabupaten Lombok	142
	Barat	Tengah	
157.		Kabupaten Lombok	179
		1 (1);	
		Timur	
158.		Kabupaten Sumbawa	344

150		IZ 1 . D	F77
159.		Kabupaten Dompu	577
160. 161.		Kabupaten Bima	368
101.		Kabupaten Sumbawa Barat	118
162.		Kabupaten Lombok Utara	33
163.		Kota Mataram	377
164.		Kota Bima	134
165.	Nusa	Kabupaten Kupang	874
166.	Tenggara	Kabupaten Timor Tengah	68
100.	Timur	Selatan	00
167.		Kabupaten Timor Tengah	37
		Utara	
168.		Kabupaten Belu	164
169.		Kabupaten Alor	149
170.		Kabupaten Flores Timur	187
171.		Kabupaten Sikka	232
172.		Kabupaten Ende	591
173.		Kabupaten Ngada	363
174.		Kabupaten Manggarai	755
175.		Kabupaten Sumba Timur	382
176.		Kabupaten Sumba Barat	290
177.		Kabupaten Lembata	324
178.		Kabupaten Rote Ndao	138
179.		Kabupaten Manggarai	209
<u></u>		Barat	
180.		Kabupaten Nagekeo	214
181.		Kabupaten Sumba	108
		Tengah	
182.		Kabupaten Sumba Barat	520
		Daya	
183.		Kabupaten Manggarai	211
		Timur	
184.		Kabupaten Sabu Raijua	75
185.		Kabupaten Malaka	143
186.	77 11	Kota Kupang	1,007
187.	Kalimantan	Kabupaten Sambas	389
188.	Barat	Kabupaten Mempawah	385
189.		Kabupaten Sanggau	346
190.		Kabupaten Ketapang	381
191.		Kabupaten Sintang	922
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	391
193.		Kabupaten Bengkayang	380
194.		Kabupaten Landak	553
195.		Kabupaten Sekadau	146
196.		Kabupaten Melawi	154
197.		Kabupaten Kayong Utara	83
198.		Kabupaten Kubu Raya	849 952
199.		Kota Pontianak	
200.	Kalimantan	Kota Singkawang	333
201.	Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	45
202.	rciigaii	Kabupaten Kotawaringin	331
404.		Timur	331
203.		Kabupaten Kapuas	785
204.		Kabupaten Barito Selatan	201
205.		Kabupaten Barito Utara	95
206.		Kabupaten Katingan	253
		Kabupaten Seruyan	154
207	i		10
207.		i Kabiibaten Siikamara	
208.		Kabupaten Sukamara	
208. 209.		Kabupaten Lamandau	60
208. 209. 210.		Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas	60 170
208. 209. 210. 211.		Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau	60 170 184
208. 209. 210. 211. 212.		Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya	60 170 184 86
208. 209. 210. 211. 212. 213.		Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur	60 170 184 86 92
208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.	Kalimantan	Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya	60 170 184 86 92 423
208. 209. 210. 211. 212. 213.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur	60 170 184 86 92

217.		Kabupaten Banjar	859
218.		Kabupaten Barito Kuala	227
219.		Kabupaten Tapin	139
220.		Kabupaten Hulu Sungai	34
440.		Selatan	J +
001			200
221.		Kabupaten Hulu Sungai	390
		Tengah	
222.		Kabupaten Hulu Sungai	513
		Utara	
223.		Kabupaten Tabalong	186
224.		Kabupaten Tanah	58
		Bumbu	
225.		Kabupaten Balangan	288
226.		Kota Banjarmasin	514
227.		Kota Banjarbaru	200
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	410
229.	Timur	Kabupaten Kutai	1,699
		Kartanegara	
230.		Kabupaten Berau	338
231.		Kabupaten Kutai Barat	323
232.	1	Kabupaten Kutai Timur	571
	1		229
233.		Kabupaten Penajam	229
		Paser Utara	
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	19
235.		Kota Balikpapan	923
236.		Kota Samarinda	1,238
237.		Kota Bontang	397
238.	Kalimantan	Kabupaten Bulungan	290
239.	Utara		64
	Otara	Kabupaten Malinau	
240.		Kabupaten Nunukan	453
241.		Kabupaten Tana Tidung	66
242.		Kota Tarakan	191
243.	Sulawesi	Kabupaten Bolaang	183
	Utara	Mongondow	
244.		Kabupaten Minahasa	741
245.		Kabupaten Kepulauan	284
2 10.		Sangihe	201
246.			201
240.		Kabupaten Kepulauan	201
		Talaud	
247.		Kabupaten Minahasa	303
		Selatan	
248.		Kabupaten Minahasa	439
		Utara	
249.		Kabupaten Minahasa	76
		Tenggara	_
250.	1	Kabupaten Bolaang	59
200.		Mongondow Utara	
251.	1		96
∠31.		Kabupaten Kepulauan	90
050		Siau Tagulandang Biaro	F0
252.		Kabupaten Bolaang	53
		Mongondow Timur	
253.		Kabupaten Bolaang	49
		Mongondow Selatan	
254.		Kota Manado	620
255.]	Kota Bitung	323
256.	1	Kota Tomohon	237
257.		Kota Kotamobagu	96
401.	0.1		56
050		Kabupaten Banggai	
258.	Sulawesi	17-1 P	207
259.	Tengah	Kabupaten Poso	386
259. 260.		Kabupaten Donggala	441
259.			
259. 260.		Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli	441
259. 260. 261. 262.		Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol	441 344 244
259. 260. 261. 262. 263.		Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali	441 344 244 181
259. 260. 261. 262.		Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai	441 344 244
259. 260. 261. 262. 263. 264.		Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kepulauan	441 344 244 181 171
259. 260. 261. 262. 263.		Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Parigi	441 344 244 181
259. 260. 261. 262. 263. 264.		Kabupaten Donggala Kabupaten Toli Toli Kabupaten Buol Kabupaten Morowali Kabupaten Banggai Kepulauan	441 344 244 181 171

266. Kabupaten Sigi 523 268. Kabupaten Sigi 523 269. Kabupaten Banggai Laut 56 269. Kabupaten Banggai Laut 56 270. Kabupaten Banggai Laut 56 270. Kabupaten Bulukumba 579 271. Selatan Selavar 272. Kabupaten Bulukumba 302 273. Kabupaten Bantaeng 136 274. Kabupaten Bantaeng 136 275. Kabupaten Bantaeng 136 276. Kabupaten Gowa 1,128 277. Kabupaten Bone 543 Kabupaten Bone 543 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Wajo 291 282. Kabupaten Barru 251 283. Kabupaten Barru 251 284. Kabupaten Buru 266 285. Kabupaten Buru 266 286.			_	
268. Kabupaten Sigi 523 269. Kabupaten Morowali 290 270. Kota Palu 579 271. Sulawesi Kabupaten Kepulauan 196 272. Selatan Kabupaten Bulukumba 302 274. Kabupaten Bulukumba 302 275. Kabupaten Bantaeng 136 276. Kabupaten Gowa 1,128 277. Kabupaten Gowa 1,128 276. Kabupaten Bone 543 277. Kabupaten Bone 543 278. Kabupaten Bone 543 Kabupaten Barru 251 280. Kabupaten Pangkajene 733 281. Kabupaten Barru 251 282. Kabupaten Sidenreng 328 283. Kabupaten Buru 251 284. Kabupaten Luwu 266 285. Kabupaten Luwu Utara 229 286. Kabupaten Luwu Utara 229 289. Kabupaten Luwu Utara 229 <td>266.</td> <td></td> <td>Kabupaten Tojo Una-Una</td> <td>225</td>	266.		Kabupaten Tojo Una-Una	225
269. Kabupaten Banggai Laut 56 270. Kota Palu 579 271. Sulawesi Schappaten Kepulauan 196 272. Selatan Selayar 302 273. Kabupaten Bulukumba 302 274. Kabupaten Bantaeng 136 275. Kabupaten Bantaeng 136 276. Kabupaten Jeneponto 527 Kabupaten Gowa 1,128 277. Kabupaten Bone 543 278. Kabupaten Bone 543 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Liwu 266 Kabupaten Liwu 266 Kabupaten Liwu 266 Kabupaten Liwu Utara 229 290. Kabupaten Liwu Timur 660 Kabupaten Kolaka 393 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Each Sabupaten Morowali Utara S79				
Each Sabupaten Morowali Utara S79	268.		Kabupaten Banggai Laut	56
Utara Kota Palu 579	269			290
Sulawesi Selatan Selatan Selayar Sel	20).		_	200
Sulawesi Selayar Sel			Utara	
Sulawesi Selayar Sel	270.		Kota Palu	579
Selatan		O1:	ł	
Rabupaten Bulukumba 302	271.	Sulawesi		196
Rabupaten Bulukumba 302		Selatan	Selavar	
273. Kabupaten Bantaeng 136	272			302
Table Company Compan				
Example Exam	273.		Kabupaten Bantaeng	136
Example Exam	274		Kabupaten Jeneponto	527
Example Exam				
277. Kabupaten Sinjai 176 176 278. Kabupaten Bone 543 543 Kabupaten Maros 514 Kabupaten Pangkajene 733 Kabupaten Pangkajene 733 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Pinrang 274 Kabupaten Pinrang 274 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu Utara 229 Kabupaten Luwu Utara 229 Kabupaten Luwu Utara 229 Kabupaten Luwu Utara 341 Kota Makassar 2,245 Kota Pare Pare 318 Kota Palopo 273 293 294 Kabupaten Kolaka 393 Tenggara Kabupaten Kolaka 393 Tenggara Kabupaten Kolaka 393 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Marao 360 Kabupaten Marao 269 Kabupaten Wakatobi 15 Kabupaten Wakatobi 15 Kabupaten Wakatobi 15 Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Buton Selatan 11 Kota Kendari 294 Kabupaten Bolemo 122 Kabupaten Bolemo 122 Kabupaten Bolemo 123 Kabupaten Bolemo 124 Kabupaten Bolemo 126 Mandar 130 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamaju 437 Kabupaten Mamuju 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	275.		Kabupaten Takalar	644
277. Kabupaten Sinjai 176 176 278. Kabupaten Bone 543 543 Kabupaten Maros 514 Kabupaten Pangkajene 733 Kabupaten Pangkajene 733 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Pinrang 274 Kabupaten Pinrang 274 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu Utara 229 Kabupaten Luwu Utara 229 Kabupaten Luwu Utara 229 Kabupaten Luwu Utara 341 Kota Makassar 2,245 Kota Pare Pare 318 Kota Palopo 273 293 294 Kabupaten Kolaka 393 Tenggara Kabupaten Kolaka 393 Tenggara Kabupaten Kolaka 393 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Marao 360 Kabupaten Marao 269 Kabupaten Wakatobi 15 Kabupaten Wakatobi 15 Kabupaten Wakatobi 15 Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Buton Selatan 11 Kota Kendari 294 Kabupaten Bolemo 122 Kabupaten Bolemo 122 Kabupaten Bolemo 123 Kabupaten Bolemo 124 Kabupaten Bolemo 126 Mandar 130 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamaju 437 Kabupaten Mamuju 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	276.		Kabupaten Gowa	1.128
Example Exam				
279. Kabupaten Maros 514 Kabupaten Kabupaten Pangkajene 733 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Soppeng 328 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Pangkajene 274 Kabupaten Enrekang 274 Kabupaten Enrekang 151 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 279 Kabupaten Luwu Timur 279 Kabupaten Toraja Utara 341 Kota Makassar 2,245 Kota Pare Pare 318 Kota Palopo 273 Kabupaten Kolaka 393 Kabupaten Muna 33 Kabupaten Muna 33 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Konawe 463 Selatan 301 Kabupaten Kolaka Utara 226 Kabupaten Kolaka Utara 226 Kabupaten Kolaka Utara 92 Kabupaten Buton Utara 93 Kabupaten Buton Utara 94 Kabupaten Buton Utara 95 Kabupaten Buton Utara 96 Kabupaten Buton Utara 96 Kabupaten Buton Utara 96 Kabupa	277.		Kabupatèn Sinjai	
279. Kabupaten Maros 514 Kabupaten Kabupaten Pangkajene 733 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Barru 251 Kabupaten Soppeng 328 Kabupaten Wajo 291 Kabupaten Pangkajene 274 Kabupaten Enrekang 274 Kabupaten Enrekang 151 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 266 Kabupaten Luwu 279 Kabupaten Luwu Timur 279 Kabupaten Toraja Utara 341 Kota Makassar 2,245 Kota Pare Pare 318 Kota Palopo 273 Kabupaten Kolaka 393 Kabupaten Muna 33 Kabupaten Muna 33 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Konawe 463 Selatan 301 Kabupaten Kolaka Utara 226 Kabupaten Kolaka Utara 226 Kabupaten Kolaka Utara 92 Kabupaten Buton Utara 93 Kabupaten Buton Utara 94 Kabupaten Buton Utara 95 Kabupaten Buton Utara 96 Kabupaten Buton Utara 96 Kabupaten Buton Utara 96 Kabupa	278.		Kabupaten Bone	543
280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 733 281. Kabupaten Barru 251 282. Kabupaten Soppeng 328 283. Kabupaten Wajo 291 284. Kabupaten Wajo 291 285. Kabupaten Enrekang 218 286. Kabupaten Pinrang 274 287. Kabupaten Luwu 266 288. Kabupaten Luwu Utara 229 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Utara 229 291. Kabupaten Luwu Timur 660 Kabupaten Kabupaten Toraja Utara 341 Kota Makassar 2,245 293. Kota Pare Pare 318 Kota Palopo 273 294. Kota Palopo 273 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 296. Tenggara Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Muna 33 298. Kabupaten Bobbana 269	270		-	
Repulauan Satus				
281. Kabupaten Barru 251 282. Kabupaten Soppeng 328 283. Kabupaten Wajo 291 284. Kabupaten Sidenreng 218 285. Kabupaten Pinrang 274 286. Kabupaten Pinrang 274 287. Kabupaten Luwu 266 288. Kabupaten Luwu Utara 229 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Utara 341 292. Kabupaten Luwu Timur 660 Kabupaten Toraja Utara 341 Kota Pare Pare 318 Kota Pare Pare 318 Kota Pare Pare 318 Kabupaten Konaka 393 Tenggara Kabupaten Konawe 360 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Bombana<	280.		Kabupaten Pangkajene	733
281. Kabupaten Barru 251 282. Kabupaten Soppeng 328 283. Kabupaten Wajo 291 284. Kabupaten Sidenreng 218 285. Kabupaten Pinrang 274 286. Kabupaten Pinrang 274 287. Kabupaten Luwu 266 288. Kabupaten Luwu Utara 229 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Utara 341 292. Kabupaten Luwu Timur 660 Kabupaten Toraja Utara 341 Kota Pare Pare 318 Kota Pare Pare 318 Kota Pare Pare 318 Kabupaten Konaka 393 Tenggara Kabupaten Konawe 360 Kabupaten Buton 73 Kabupaten Bombana<			Kenulauan	
282. 283. Kabupaten Soppeng 328 284. Kabupaten Wajo 291 284. Kabupaten Sidenreng 218 284. Kabupaten Sidenreng 218 285. 286. Kabupaten Enrekang 151 287. Kabupaten Luwu 266 288. Kabupaten Luwu Utara 229 289. Kabupaten Luwu Timur 660 290. Kabupaten Luwu Timur 660 291. Kabupaten Luwu Timur 660 292. Kabupaten Luwu Timur 660 293. Kabupaten Toraja Utara 341 Kota Pare Pare 318 Kota Pare Pare 318 Kota Pare Pare 318 Kota Palopo 273 294. Kabupaten Kolaka 393 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 296. Kabupaten Buton 73 Kabupaten Bombana 269 300. Kabupaten Bombana 269 Kabupaten Konawe Utara 94 <tr< td=""><td>001</td><td></td><td></td><td>051</td></tr<>	001			051
283. Kabupaten Wajo 291 284. Kabupaten Sidenreng 218 285. Kabupaten Pinrang 274 286. Kabupaten Enrekang 151 287. Kabupaten Luwu 266 288. Kabupaten Luwu Utara 229 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Timur 660 291. Kabupaten Luwu Timur 660 292. Kabupaten Luwu Timur 660 293. Kaou Pare Pare 318 294. Kota Pare Pare 318 295. Katu Pare Pare 318 296. Tenggara Kabupaten Kolaka 393 297. 298. Kabupaten Muna 33 299. Kabupaten Buton 73 Kabupaten Bombana 269 300. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Kolaka Utara 24 303. Kabupaten Kolaka Utara 24 304. Kabupaten Kolaka Timur	281.		Kabupatèn Barru	
283. Kabupaten Wajo 291 284. Kabupaten Sidenreng 218 285. Kabupaten Pinrang 274 286. Kabupaten Enrekang 151 287. Kabupaten Luwu 266 288. Kabupaten Luwu Utara 229 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Timur 660 291. Kabupaten Luwu Timur 660 292. Kabupaten Luwu Timur 660 293. Kaou Pare Pare 318 294. Kota Pare Pare 318 295. Katu Pare Pare 318 296. Tenggara Kabupaten Kolaka 393 297. 298. Kabupaten Muna 33 299. Kabupaten Buton 73 Kabupaten Bombana 269 300. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Kolaka Utara 24 303. Kabupaten Kolaka Utara 24 304. Kabupaten Kolaka Timur	282		Kabupaten Soppeng	328
September Stabupaten Sidenreng Rappang Stabupaten Pinrang Stab				
Rappang				
Rappang	284.		Kabupaten Sidenreng	218
285. Kabupaten Pinrang 274 286. Kabupaten Enrekang 151 287. Kabupaten Luwu 266 288. Kabupaten Luwu Utara 229 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Timur 660 291. Kabupaten Luwu Timur 660 292. Kabupaten Koraja Utara 341 292. Kota Makassar 2,245 293. Kota Pare Pare 318 294. Kota Palopo 273 295. Kabupaten Kolaka 393 296. Tenggara Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Konawe 360 298. Kabupaten Konawe 463 Selatan Selatan 300. 300. Kabupaten Bombana 269 Kabupaten Wakatobi 15 Kabupaten Wakatobi 15 Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Buton Utara 94 304. Kabupaten Konawe <				
286. 287. Kabupaten Enrekang 151 288. Kabupaten Luwu 266 289. Kabupaten Tana Toraja 517 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Timur 660 291. Kabupaten Toraja Utara 341 292. Kota Makassar 2,245 293. Kota Palopo 273 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 296. Tenggara Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Konawe 360 298. Kabupaten Konawe 463 299. Kabupaten Konawe 463 Selatan Kabupaten Konawe 463 301. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Konawe Utara 94 Kabupaten Konawe Utara 94 Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kepulauan 24 307. Kabupaten Muna Barat 60 Kabupaten Buton Tengah 13 310. Kabupaten Bo	000			2E:
286. 287. Kabupaten Enrekang 151 288. Kabupaten Luwu 266 289. Kabupaten Tana Toraja 517 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Timur 660 291. Kabupaten Toraja Utara 341 292. Kota Makassar 2,245 293. Kota Palopo 273 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 296. Tenggara Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Konawe 360 298. Kabupaten Konawe 463 299. Kabupaten Konawe 463 Selatan Kabupaten Konawe 463 301. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Konawe Utara 94 Kabupaten Konawe Utara 94 Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Kepulauan 24 307. Kabupaten Muna Barat 60 Kabupaten Buton Tengah 13 310. Kabupaten Bo	285.		Kabupaten Pinrang	274
287. Kabupaten Luwu 266 288. Kabupaten Tana Toraja 517 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Utara 341 292. Kabupaten Luwu Timur 660 Kabupaten Luwu Timur 660 Kabupaten Konaju Utara 341 Kota Makassar 2,245 293. Kota Pare Pare 318 Kota Palopo 273 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 296. Tenggara Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Konawe 360 298. Kabupaten Konawe 463 Selatan Kabupaten Buton 73 300. Kabupaten Konawe 269 Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Konawe Utara 94 304. Kabupaten Buton Utara 94 305. Kabupaten Buton Tengah 13 307. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabup				
288. Kabupaten Tana Toraja 517 289. Kabupaten Luwu Utara 229 290. Kabupaten Luwu Timur 660 291. Kabupaten Toraja Utara 341 292. Kota Makassar 2,245 293. Kota Pare Pare 318 294. Kota Palopo 273 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 296. Tenggara Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Konawe 463 298. Kabupaten Buton 73 299. Kabupaten Bombana 269 Kabupaten Bombana 269 Kabupaten Bombana 269 Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 Kabupaten Konawe 15 Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe 24 Kepulauan 307. Kabupaten Muna Barat 60 Kabupaten Muna Barat 60 Kota Kendari				
Rabupaten Luwu Utara 229	287.		Kabupaten Luwu	
Rabupaten Luwu Utara 229	288		Kabupaten Tana Toraia	517
Separate Separate				
Section				
Section	290.		Kabupaten Luwu Timur	660
Solution			-	
Kota Pare Pare 318				
294. Kota Palopo 273 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 296. Tenggara Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Muna 33 298. Kabupaten Buton 73 299. Kabupaten Konawe 463 300. Kabupaten Bombana 269 301. Kabupaten Bombana 269 301. Kabupaten Bombana 269 302. Kabupaten Bombana 269 303. Kabupaten Wakatobi 15 304. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Konawe 24 Kepulauan Kabupaten Konawe 24 Kepulauan Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 Kota Baubau 25 312. Kabupaten Bone Bolango 340	292.		Kota Makassar	2,245
294. Kota Palopo 273 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 296. Tenggara Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Muna 33 298. Kabupaten Buton 73 299. Kabupaten Konawe 463 300. Kabupaten Bombana 269 301. Kabupaten Bombana 269 301. Kabupaten Bombana 269 302. Kabupaten Bombana 269 303. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Konawe 24 Kepulauan 307 308. Kabupaten Muna Barat 60 Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 Kota Baubau 25 312. Kabupaten Gorontalo 269 Kabupaten Bone Bolango 340 <td>203</td> <td></td> <td>Kota Pare Pare</td> <td>318</td>	203		Kota Pare Pare	318
295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 393 297. Kabupaten Konawe 360 297. Kabupaten Muna 33 298. Kabupaten Buton 73 299. Kabupaten Buton 73 300. Kabupaten Konawe 463 301. Kabupaten Bombana 269 301. Kabupaten Bombana 269 302. Kabupaten Wakatobi 15 303. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 Kabupaten Buton Utara 92 Kabupaten Konawe 24 Kepulauan Kabupaten Konawe 24 Kepulauan Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kabupaten Buton Selatan 11 311. Kota Kendari 294 312. Kabupaten Boalemo 122 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Boalemo 122				
Tenggara Kabupaten Konawe 360	294.		Kota Palopo	273
Tenggara Kabupaten Konawe 360	295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	393
September Sept				
298. Kabupaten Buton 73 299. Kabupaten Konawe 463 300. Kabupaten Bombana 269 301. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 304. Kabupaten Buton Utara 92 305. Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Konawe 24 Kepulauan 307 308. Kabupaten Muna Barat 60 Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Kendari 294 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Bone Bolango 340 Kabupaten Bone Bolango 340 Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamasa 351 <td>296.</td> <td>Tenggara</td> <td></td> <td>360</td>	296.	Tenggara		360
298. Kabupaten Buton 73 299. Kabupaten Konawe 463 300. Kabupaten Bombana 269 301. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 304. Kabupaten Buton Utara 92 305. Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Konawe 24 Kepulauan 307 308. Kabupaten Muna Barat 60 Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Kendari 294 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Bone Bolango 340 Kabupaten Bone Bolango 340 Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamasa 351 <td>297.</td> <td></td> <td>Kabupaten Muna</td> <td>33</td>	297.		Kabupaten Muna	33
Selatan Sela				
Selatan Kabupaten Bombana 269				
Selatan Kabupaten Bombana 269	299.		Kabupaten Konawe	463
300. Kabupaten Bombana 269 301. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 304. Kabupaten Buton Utara 92 305. Kabupaten Kolaka Timur 307 306. Kabupaten Konawe 24 Kepulauan Kabupaten Muna Barat 60 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 Kota Kendari 294 Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 Xabupaten Boalemo 122 Kabupaten Bone Bolango 340 Xabupaten Pohuwato 118 Xabupaten Gorontalo 16 Utara Kota Gorontalo 32 Xabupaten Mamuju 437 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamuju 100				
301. Kabupaten Wakatobi 15 302. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 304. Kabupaten Buton Utara 92 305. Kabupaten Kolaka Timur 307 306. Kabupaten Konawe 24 Kepulauan Kabupaten Muna Barat 60 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Gorontalo 16 316. Kabupaten Pohuwato 118 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamuju 437 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Mamuju 636				
302. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 304. Kabupaten Buton Utara 92 305. Kabupaten Kolaka Timur 307 306. Kabupaten Konawe 24 Kepulauan Kabupaten Muna Barat 60 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Bone Bolango 340 314. Kabupaten Pohuwato 118 315. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamasa 351 320. Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamajene 378 K	300.		Kabupaten Bombana	269
302. Kabupaten Kolaka Utara 226 303. Kabupaten Konawe Utara 94 304. Kabupaten Buton Utara 92 305. Kabupaten Kolaka Timur 307 306. Kabupaten Konawe 24 Kepulauan Kabupaten Muna Barat 60 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Bone Bolango 340 314. Kabupaten Pohuwato 118 315. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamasa 351 320. Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Mamajene 378 K	301		Kabupaten Wakatobi	15
Sabupaten Konawe Utara 94				
304. Kabupaten Buton Utara 92 305. Kabupaten Kolaka Timur 307 306. Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Muna Barat 60 Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Gorontalo 16 316. Kabupaten Gorontalo 32 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100			Kabupatèn Kolaka Utara	226
304. Kabupaten Buton Utara 92 305. Kabupaten Kolaka Timur 307 306. Kabupaten Konawe 24 Kabupaten Muna Barat 60 Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Gorontalo 16 316. Kabupaten Gorontalo 32 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	302.		Kahunaten Konawe Utara	
Kabupaten Kolaka Timur 307				94
306. Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat 60	303.			
306. Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat 60	303. 304.		Kabupaten Buton Utara	92
Kepulauan Kabupaten Muna Barat 60	303. 304.		Kabupaten Buton Utara	92
Sabupaten Muna Barat Sabupaten Buton Tengah Sabupaten Buton Selatan Sabupaten Selatan Sabupaten Selatan Sabupaten Selatan Sabupaten Se	303. 304. 305.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur	92 307
308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara Vuara 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe	92 307
308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara Vuara 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe	92 307 24
309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 294 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 Kabupaten Pohuwato 118 Kabupaten Pohuwato 16 Utara Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan	92 307 24
Kota Kendari 294	303. 304. 305. 306.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat	92 307 24 60
Kota Kendari 294	303. 304. 305. 306. 307. 308.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah	92 307 24 60 13
311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara Vitara 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah	92 307 24 60 13
312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 269 313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan	92 307 24 60 13
313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari	92 307 24 60 13 11 294
313. Kabupaten Boalemo 122 314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari	92 307 24 60 13 11 294
314. Kabupaten Bone Bolango 340 315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 Utara Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau	92 307 24 60 13 11 294 25
315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo	92 307 24 60 13 11 294 25 269
315. Kabupaten Pohuwato 118 316. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122
316. Kabupaten Gorontalo 16 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 322. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122
Utara 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340
Utara 317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118
317. Kota Gorontalo 32 318. Sulawesi Kabupaten Pasangkayu 262 319. Barat Kabupaten Mamuju 437 320. Kabupaten Mamasa 351 Kabupaten Polewali 636 Mandar Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118
318.SulawesiKabupaten Pasangkayu262319.BaratKabupaten Mamuju437320.Kabupaten Mamasa351321.Kabupaten Polewali636MandarMandar378323.Kabupaten Mamuju100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118
319.BaratKabupaten Mamuju437320.Kabupaten Mamasa351321.Kabupaten Polewali Mandar636322.Kabupaten Majene378323.Kabupaten Mamuju100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315.	Gorontalo	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16
319.BaratKabupaten Mamuju437320.Kabupaten Mamasa351321.Kabupaten Polewali Mandar636322.Kabupaten Majene378323.Kabupaten Mamuju100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16
320. Kabupaten Mamasa 351 321. Kabupaten Polewali 636 Mandar 322. Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316.		Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16
321. Kabupaten Polewali 636 Mandar 322. Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pasangkayu	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16
321. Kabupaten Polewali 636 Mandar 322. Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Mamuju	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437
Mandar 322. Kabupaten Majene 378 323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Mamuju	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437
322.Kabupaten Majene378323.Kabupaten Mamuju100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Mamasa	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437 351
323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437 351
323. Kabupaten Mamuju 100	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mandar	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437 351 636
	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mandar	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437 351 636
Tengah	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pohuwato	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437 351 636 378
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437 351 636 378
	303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321.	Sulawesi	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kota Kendari Kota Baubau Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa	92 307 24 60 13 11 294 25 269 122 340 118 16 32 262 437 351 636 378

Maluku				
325. Kabupaten Maluku	324.	Maluku		54
Sabupaten Kepulauan	325.		Kabupaten Maluku	16
Sand	326.		Kabupaten Kepulauan	14
Sabupaten Seram Bagian 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19				
Timur				
Same	328.		_	16
Barat Kabupaten Kepulauan 14 Aru 331. Kabupaten Maluku Barat 105 Daya 332. Kabupaten Buru Selatan 9 Kota Ambon 69 Kota Pual 11 Maluku Utara Barat Kabupaten Halmahera 85 Tengah Rabupaten Halmahera 282 Utara Salatan 282 Utara 338. Kabupaten Halmahera 282 Utara 339. Kabupaten Halmahera 213 Timur 341. Kabupaten Halmahera 213 Timur 342. Kabupaten Pulau Morotai 50 Kabupaten Pulau Morotai 50 Kabupaten Pulau Taliabu 8 Kota Tidore Kepulauan 73 344. Kota Tidore Kepulauan 73 344. Kota Tidore Kepulauan 74 Kabupaten Jayapura 92 Kabupaten Mapura 92 Kabupaten Mapura 92 Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 350. Kabupaten Biak Numfor 108 Kabupaten Biak Numfor	329.			25
Aru			Barat	
Daya Rabupaten Buru Selatan 9 Solatan 333. Kota Ambon 669 Solatan 334. Solatan Solat	330.			14
332. Kabupaten Buru Selatan 9 333. Kota Ambon 69 334. Kota Tual 11 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera 85 336. Kabupaten Halmahera 282 337. Kabupaten Halmahera 282 338. Kabupaten Halmahera 171 340. Kabupaten Halmahera 213 340. Kabupaten Halmahera 213 341. Kabupaten Halmahera 213 341. Kabupaten Halmahera 213 342. Kabupaten Halmahera 213 341. Kabupaten Halmahera 213 341. Kabupaten Halmahera 213 342. Kabupaten Halmahera 213 343. Kabupaten Halmahera 213 344. Kabupaten Halmahera 213 344. Kabupaten Pulau Morotai 50 342. Kabupaten Pulau Morotai 50 342. Kabupaten Merauke 170 344. Kabupate	331.			105
Sample	332.			9
Maluku				
335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 85 336. Kabupaten Halmahera Tengah 8 337. Kabupaten Halmahera Utara 282 338. Kabupaten Halmahera Utara 171 339. Kabupaten Kepulauan Sula 73 340. Kabupaten Halmahera Timur 213 341. Kabupaten Pulau Morotai 50 342. Kabupaten Pulau Morotai 50 343. Kota Ternate 174 344. Kota Tidore Kepulauan 73 344. Kabupaten Merauke 170 345. Kabupaten Merauke 170 346. Kabupaten Jayawijaya 151 347. Kabupaten Nabire 106 348. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Nabire 106 Kabupaten Nabire 106 Kabupaten Nabire 108 350. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Puncak Jaya <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
Sample		Molular		
Tengah Sabupaten Halmahera 282			Barat	
Utara Selatan 171 Selatan 338. Kabupaten Halmahera Selatan 340. Kabupaten Kepulauan 73 Sula 341. Kabupaten Halmahera 213 Timur 341. Kabupaten Pulau Morotai 50 Kabupaten Pulau Taliabu 8 Kabupaten Pulau Taliabu 8 Kota Ternate 174 Kota Tidore Kepulauan 73 345. Papua Kabupaten Merauke 170 Kabupaten Jayawijaya 151 Kabupaten Jayapura 92 Kabupaten Jayapura 92 Kabupaten Jayapura 92 Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 350. Kabupaten Biak Numfor 108 Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Puncak Jaya 19 353. Kabupaten Mimika 158 Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Keerom 42 Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 357. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 358. Kabupaten Tolikara 22 Kabupaten Waropen 5 Kabupaten Boven Digoel 152 Kabupaten Mampi 74 Kabupaten Mampi 74 Kabupaten Mamberamo 18 Raya 365. Kabupaten Mamberamo 18 Kabupaten Mamberamo 18 Raya 369. Kabupaten Nduga 82 Kabupaten Nduga 82 Kabupaten Intan Jaya 77 372. Kabupaten Intan Jaya 77 372. Kabupaten Intan Jaya 77 372. Kabupaten Intan Jaya 75 Kabupaten Intan Jaya 77 372. Kabupaten Intan Jaya 75 Kabupaten Intan Jaya 77 372. Kabupaten Intan Jaya 75 Kabupaten Intan Jaya 77 372. Kabupaten Intan Jaya 75	336.			8
Selatan Sabupaten Kepulauan Sula	337.			282
339. Kabupaten Kepulauan Sula 73 340. Kabupaten Halmahera Timur 213 341. Kabupaten Pulau Morotai 50 342. Kabupaten Pulau Taliabu 8 343. Kota Ternate 174 344. Kota Tidore Kepulauan 73 345. Papua Kabupaten Merauke 170 346. Kabupaten Jayawijaya 151 347. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Kepulauan Yapen 14 350. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 357. Kabupaten Weropen 5 360. Kabupaten Waropen 5 361. Kabupat	338.		Kabupaten Halmahera	171
340. Kabupaten Halmahera Timur 213 341. Kabupaten Pulau Morotai 50 342. Kabupaten Pulau Taliabu 8 343. Kota Ternate 174 344. Kota Tidore Kepulauan 73 345. Papua Kabupaten Merauke 170 346. Kabupaten Merauke 170 347. Kabupaten Jayawijaya 151 348. Kabupaten Jayawijaya 151 348. Kabupaten Jayawijaya 166 349. Kabupaten Jayawijaya 16 349. Kabupaten Pajayawijaya 16 349. Kabupaten Mepulauan 14 Yapen 106 8 351. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 108 Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Pincak Jaya 19 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Keerom 42 Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 357.	339.		Kabupaten Kepulauan	73
341. Kabupaten Pulau Morotai 50 342. Kabupaten Pulau Taliabu 8 343. Kota Ternate 174 344. Kota Tidore Kepulauan 73 345. Papua Kabupaten Merauke 170 346. Kabupaten Jayawijaya 151 347. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Nabire 106 Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 350. Kabupaten Kepulauan 19 Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Puncak Jaya 19 353. Kabupaten Puncak Jaya 19 354. Kabupaten Puncak Jaya 19 355. Kabupaten Sarmi 29 Kabupaten Keerom 42 23 355. Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Waropen 5 Kabupaten Boven Digoel 152<	340.		Kabupaten Halmahera	213
342. Kabupaten Pulau Taliabu 8 343. Kota Ternate 174 344. Kota Tidore Kepulauan 73 345. Papua Kabupaten Merauke 170 346. Kabupaten Merauke 170 347. Kabupaten Jayawijaya 151 348. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Jayapura 106 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Kabupaten Kepulauan 19 Kabupaten Kepulauan 19 Kabupaten Paniai 123 Kabupaten Paniai 123 Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Sarmi 29 Kabupaten Keerom 42 355. Kabupaten Keerom 42 Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 29 357. Kabupaten Yahukimo 28 Kabupaten Waropen 5 Kabupaten Marpi 74 360.	241			FO
343. Kota Ternate 174 344. Kota Tidore Kepulauan 73 345. Papua Kabupaten Merauke 170 346. Kabupaten Jayawijaya 151 347. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Jayapura 92 349. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 108 Kabupaten Nabire 108 Kabupaten Puncak Jaya 19 108 Kabupaten Puncak Jaya 19 19 350. Kabupaten Puncak Jaya 19 351. Kabupaten Mimika 158 352. Kabupaten Keerom 42 353. Kabupaten Pegunungan 11 351. Kabupaten Waropen 5 352. Kabupaten Mappi </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td>				_
344. Kota Tidore Kepulauan 73 345. Papua Kabupaten Merauke 170 346. Kabupaten Jayawijaya 151 347. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Kepulauan Yapen 14 350. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Puncak Jaya 19 353. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang Kabupaten Pegunungan 11 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Waropen 5 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Mamberamo 18 Raya Kabupaten Mamberamo <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
345. Papua Kabupaten Merauke 170 346. Kabupaten Jayawijaya 151 347. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Nabire 106 Kabupaten Kepulauan 14 14 350. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Mimika 158 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Neerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Mappi 74 361. Kabupaten Asmat 74				
346. Kabupaten Jayawijaya 151 347. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 108 350. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 18 Kabupaten Mamberamo 18 Kabupaten Mamberamo 10 Kabupaten Mamberamo 145 368.				
347. Kabupaten Jayapura 92 348. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Kepulauan Yapen 14 350. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan Bintang 11 357. Kabupaten Pegunungan Bintang 28 358. Kabupaten Yahukimo 28 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Samat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 365. Kabupaten Mamberamo 18 Tengah Kabupaten Mamberamo 10 367. Kabupaten Mamberamo 10 368. Kabupaten Nduga 82 <td></td> <td>Papua</td> <td>-</td> <td></td>		Papua	-	
348. Kabupaten Nabire 106 349. Kabupaten Kepulauan 14 350. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang Sas. Kabupaten Pegunungan 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 22 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Samat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya Raya 36 365. Kabupaten Mamberamo 18 Kabupaten Mamberamo 10 36 366. Kabupaten Mamberamo 145 368. <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
349. Kabupaten Kepulauan 14 350. Kabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Waropen 5 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya Raya 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 36 366. Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Hanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupat			Kabupaten Jayapura	92
350. Xabupaten Biak Numfor 108 351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 8 Kabupaten Pegunungan 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 22 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya Kabupaten Mamberamo 39 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah Kabupaten Nduga 82 366. Kabupaten Nduga 82 367. Kabupaten Nduga 82 368. Kabupaten Puncak 82 370. <	348.		Kabupaten Nabire	
351. Kabupaten Puncak Jaya 19 352. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 8 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Yahukimo 28 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 36 Kabupaten Mamberamo 10 367. Kabupaten Nduga 82 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Intan Jaya 7 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372.	349.			14
352. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan Bintang 11 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Yahukimo 28 359. Kabupaten Yahukimo 22 360. Kabupaten Waropen 5 361. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Supiori 15 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 18 18 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 36 Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Intan Jaya 7 371. Kabupaten Deiyai 55	350.		Kabupaten Biak Numfor	108
352. Kabupaten Paniai 123 353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan Bintang 11 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Yahukimo 28 359. Kabupaten Yahukimo 22 360. Kabupaten Waropen 5 361. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Supiori 15 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 18 18 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 36 Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Intan Jaya 7 371. Kabupaten Deiyai 55	351.		Kabupaten Puncak Jaya	19
353. Kabupaten Mimika 158 354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 11 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Yahukimo 28 359. Kabupaten Yahukimo 22 360. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 18 18 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 36 Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>123</td></t<>				123
354. Kabupaten Sarmi 29 355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 11 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Yahukimo 28 359. Kabupaten Tolikara 22 360. Kabupaten Waropen 5 361. Kabupaten Boven Digoel 152 362. Kabupaten Mappi 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 18 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah Kabupaten Mamberamo 39 Kabupaten Yalimo 10 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55			-	
355. Kabupaten Keerom 42 356. Kabupaten Pegunungan 11 Bintang 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 22 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 80 10 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 10 10 367. Kabupaten Yalimo 10 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Nduga 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
356. Kabupaten Pegunungan 11 357. Sabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 22 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 18 Raya 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 36 Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 22 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 36 Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 366. Kabupaten Mamberamo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 22 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 36 Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 36 Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
358. Kabupaten Tolikara 22 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 36 Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 366. Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55	357.			28
359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 39 Tengah 39 366. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 10 367. Kabupaten Yalimo 10 368. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 370. Kabupaten Puncak 82 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
360. Kabupaten Boven Digoel 152 361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 80 Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 10 Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
361. Kabupaten Mappi 74 362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya Raya 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 10 366. Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
362. Kabupaten Asmat 74 363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 36 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 10 366. Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
363. Kabupaten Supiori 15 364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 10 366. Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
364. Kabupaten Mamberamo 18 Raya 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 366. Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
Raya 365. Kabupaten Mamberamo 39 Tengah 10 366. Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
Tengah 366. Kabupaten Yalimo 10 367. Kabupaten Lanny Jaya 145 368. Kabupaten Nduga 82 369. Kabupaten Puncak 82 370. Kabupaten Dogiyai 71 371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55			Raya	
367.Kabupaten Lanny Jaya145368.Kabupaten Nduga82369.Kabupaten Puncak82370.Kabupaten Dogiyai71371.Kabupaten Intan Jaya7372.Kabupaten Deiyai55	365.			39
367.Kabupaten Lanny Jaya145368.Kabupaten Nduga82369.Kabupaten Puncak82370.Kabupaten Dogiyai71371.Kabupaten Intan Jaya7372.Kabupaten Deiyai55	366.		Kabupaten Yalimo	10
368.Kabupaten Nduga82369.Kabupaten Puncak82370.Kabupaten Dogiyai71371.Kabupaten Intan Jaya7372.Kabupaten Deiyai55				145
369.Kabupaten Puncak82370.Kabupaten Dogiyai71371.Kabupaten Intan Jaya7372.Kabupaten Deiyai55				
370.Kabupaten Dogiyai71371.Kabupaten Intan Jaya7372.Kabupaten Deiyai55				
371. Kabupaten Intan Jaya 7 372. Kabupaten Deiyai 55				
372. Kabupaten Deiyai 55			1 00	
1				
Thom on a part 221				
	5.0.	<u> </u>		44 T

374.	Papua	Kabupaten Sorong	69
375.	Barat	Kabupaten Manokwari	126
376.		Kabupaten Fak Fak	59
377.		Kabupaten Sorong	36
		Selatan	
378.		Kabupaten Raja Ampat	72
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	99
380.		Kabupaten Teluk	25
		Wondama	
381.		Kabupaten Kaimana	48
382.		Kabupaten Tambrauw	2
383.		Kabupaten Maybrat	6
384.		Kabupaten Manokwari	19
		Selatan	
385.		Kabupaten Pegunungan	5
		Arfak	
386.		Kota Sorong	202

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin upaya ini dilakukan untuk orang dan menurunkan laju penularan mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- 1. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUABELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

- rasionalisasi dan/atau 2) tata cara realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan 2019 Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Tertentu, Anggaran untuk Kegiatan Alokasi Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan **KPM** data oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APRD

KETIGABELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD:
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/ atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah APBD, dan memberitahukan tentang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil anggaran penjadwalan ulang alokasi capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEEMPATBELAS:

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman danInvestasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H. Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 19960